



PEMERINTAH  
KABUPATEN MAGETAN

# RENSTRA

(Rencana Strategis)

**KECAMATAN NGUNTORONADI**  
**KABUPATEN MAGETAN**  
**TAHUN 2025-2029**





## KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Kecamatan Nguntoronadi Tahun 2025-2029 disusun untuk memberikan kepastian arah kebijakan, strategi, tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang terukur dalam melaksanakan program dan kegiatan. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan Tahun 2025–2029 merupakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah perangkat daerah yang mencakup periode lima tahun. Renstra ini disusun sebagai bentuk operasionalisasi visi, misi, serta tujuan pembangunan daerah, yang berisi program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan, dengan tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2025–2029, dan bersifat indikatif.

Penyusunan Renstra Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan tahun 2025– 2029 ini mengacu pada visi, misi dan program Bupati Magetan yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini dan sernoga Allah SWT. Senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan Pembangunan di Kabupaten Magetan.

Magetan, 18 Desember 2025



FILCO YUDHA ARISTA, S.IP, MM  
Pembina (IV/a)  
NIP 198801072007011001



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	5
1.4 Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b> .....	<b>10</b>
2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Nguntoronadi .....	11
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	36
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b> .....	<b>39</b>
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2025-2029 .....	41
3.2 Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 .....	42
3.3 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.....	43
<b>BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b> .....	<b>44</b>
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>77</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dokumen Rencana Strategis Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan Tahun 2025—2029 disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2025—2029.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2029 secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pada pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra, proses tersebut telah menghasilkan Renstra Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan yang memuat visi, misi, tujuan sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2029.

Dengan memperhatikan berbagai perkembangan yang mempengaruhi kehidupan dan struktur organisasi perangkat daerah, yakni berbagai peraturan perundangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka dibuatlah Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Nguntoronadi Tahun 2025—2029. Dokumen Renstra ini merupakan rencana pembangunan jangka menengah Kecamatan Nguntoronadi yang dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Nguntoronadi yang akan disusun setiap tahun sebagai Rencana Pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban. Renstra ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat yang diemban



Kecamatan Nguntoronadi sebagaimana ketentuan dan sekaligus langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah sebagaimana ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Karena mengacu pada RPJMD Kabupaten Magetan, maka secara otomatis Renstra Kecamatan Nguntoronadi juga mengacu pada dokumen perencanaan di atasnya yaitu RPJPD Kabupaten Magetan, RPJMD Provinsi Jawa Timur, serta RPJM Nasional.

## 1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029 berdasarkan dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
  12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Instruksi Menetri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengan Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025–2045;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 03 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2025-2029;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2024 tentang RPJPD Kabupaten Magetan Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024 Nomor 03);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2024–2044;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2025–2029;
26. Peraturan Bupati Magetan Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Magetan.



### 1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Kecamatan Nguntoronadi Tahun 2025—2029 dimaksudkan agar:

- a. Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, regional, nasional dan global sehingga di samping tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga mampu eksis dan berkembang dalam rangka meningkatkan kinerja profesionalnya;
- b. Menjamin adanya konsistensi perencanaan, pemilihan program dan kegiatan prioritas daerah sesuai dengan kebutuhan daerah dan kondisi daerah pada saat itu.
- c. Pedoman perencanaan dan monitoring atau pengendalian serta evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Nguntoronadi dalam urusan kewilayahan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan yang memuat pokok-pokok kebijakan dan program/ kegiatan/ sub-kegiatan dalam Urusan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan selama tahun 2025-2029.

Adapun tujuan disusun Renstra Kecamatan Nguntoronadi Tahun 2025—2029 adalah untuk:

1. Menjabarkan arahan RPJMD Kabupaten Nguntoronadi Tahun 2025—2029 ke dalam rencana instansional;
2. Menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah 2025—2029 ke dalam tujuan, sasaran dan program kerja operasional serta kegiatan indikatif Kecamatan Nguntoronadi;
3. Menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai acuan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja tahunan;
4. Menentukan strategi untuk pengelolaan keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, peningkatan komunikasi vertikal dan horizontal, peningkatan produktivitas dan menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan Tahun 2025—2029 adalah sebagai berikut:



<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>		
1.1	Latar Belakang	Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra PD Tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi dan nilai strategis Renstra Perangkat Daerah.
1.2	Dasar Hukum Penyusunan	Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.
1.3	Maksud dan Tujuan	Berisi tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
1.4	Sistematika Penulisan	Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra PD.
<b>BAB II: GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGI PERANGKAT DAERAH</b>		
2.1	Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	
2.1.1	Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah	Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah Kepala Perangkat Daerah
2.1.2	Sumber Daya Perangkat Daerah	Penjelasan ringkas tentang sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya (mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional)



2.1.3	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya (SPM, SDG's, indikator yang telah di ratifikasi Pemerintah, dan indikator pelayanan perangkat daerah lainnya)
2.1.4	Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah	Berisi kelompok sasaran yang mendapatkan pelayanan Perangkat Daerah
2.1.5	Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan	Berisi uraian mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan
2.1.6	Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah	Berisi uraian Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah.
2.1.7	Kerjasama Daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah	Berisi uraian Kerjasama Daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah
2.2	Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	
2.2.1	Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	Permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
2.2.2	Isu-isu Strategis Perangkat Daerah	Isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah Tahun rencana
<b>BAB III: TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN</b>		
3.1	Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2025- 2029	Menunjukkan keterkaitan dan konsistensi antar tujuan RPJMD periode berkenaan dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah



3.2	Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029	Rumusan pernyataan strategi Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang
3.3	Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029	Rumusan pernyataan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang
<b>BAB IV: PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>		
4.1	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah hasil Cascading dari Tujuan, Sasaran, Outcome dan Output	Memuat Daftar program, kegiatan, dan subkegiatan dalam mencapai kinerja Perangkat Daerah dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030 sehingga perlu pernyataan eksplisit bahwa program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah yaitu pijakan penyusunan Renja PD Tahun 2030.
4.2	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah mengacu pada Nomenklatur	Memuat daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah mengacu pada Nomenklatur
4.3	Sub Kegiatan dalam rangka mendukung prioritas pembangunan daerah	Memuat data Sub Kegiatan dalam rangka mendukung prioritas pembangunan daerah
4.4	Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan	Memuat data Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan



	daerah tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	daerah tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)
4.5	Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	Memuat Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
<b>BAB V: PENUTUP</b>		
51.	PENUTUP	Menyajikan kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan Pemerintahan Daerah.



## BAB II

### **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Dalam kedudukan dan fungsinya kecamatan memiliki posisi yang sangat penting karena keberhasilan tugas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta mengembangkan potensi wilayah sangat ditunjang oleh keberadaan pemerintah kecamatan, untuk itu tantangan yang harus dijawab adalah bagaimana mewujudkan pemerintahankecamatan yang berwibawa dan mampu memberikan pelayanan serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.

Memenuhi maksud tersebut, kiranya upaya untuk memperkuat Pemerintah Kecamatan maka dikeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 82 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Kecamatan. Dengan didasarkan pada ketentuan pasal 2 yang berbunyi Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, Camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Melalui urusan tersebut, Pemerintah Kecamatan Nguntoronadi berupaya meningkatkan kemampuan pelayanan yang profesional, efektif, efisien, akuntabel dan transparan, dengan meningkatkan perbaikan proses mekanisme perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi serta mengharapkan kiranya Pemerintah Kabupaten segera Menyusun berbagai kebijakan, yang menunjang pada kelancaran pelaksanaan tugas pelimpahan sebagian urusan yang diberikan Bupati kepada Camat dan Lurah agar mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat.



## 2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Nguntoronadi

### 2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Kecamatan Nguntoronadi

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada Daerah Kota/Kabupaten untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 224 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa keberadaan Kecamatan adalah:

1. Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
2. Bupati/Wali Kota wajib mengangkat Camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pengangkatan Camat yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatalkan keputusan pengangkatannya oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

#### 1) FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 82 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Kabupaten Magetan. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok, kecamatan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program dan kegiatan Kecamatan;
2. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang ekonomi, sosial dan pembangunan;
3. Penyelenggaraan pelayanan publik yang menjadi kewenangannya;
4. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan / atau kelurahan;
5. Pembinaan kepegawaian Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan;



6. Pelaksanaan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan terhadap kewenangan yang menjadi tanggung jawab Kecamatan;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2) TUGAS

Tugas dari masing-masing jabatan yakni:

1. Camat

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan kemasyarakatan dalam wilayah kerja Kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Camat mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah ditingkat Kecamatan
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan / atau kelurahan;
- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- j. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.



## 2. Sekretaris Kecamatan

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, membina, dan mengevaluasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan.

Untuk menyelenggarakan tugas kesekretariatan Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas :

- a. Pengelolaan urusan surat-menyurat, kearsipan keprotokolan, rumah tangga, ketertiban, keamanan, penyelenggaraan rapat dan perjalanan dinas;
- b. Penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- c. Pengelolaan barang Inventaris dan perlengkapan;
- d. Pengelolaan urusanKepegawaian;
- e. Pengelolaan urusan keuangan;
- f. Pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan pada kecamatan dan kelurahan;
- g. Pengelolaan urusan kesejahteraan pegawai;
- h. Pelaksanaan fasilitas penyusunan program dan kegiatan pada kecamatan dan kelurahan;
- i. Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik;dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

## 3. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

Melaksanakan tugas di bidang administrasi umum dan kepegawaian juga melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas antara lain :

- a. Melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi kecamatan;
- b. Membuat perencanaan pengadaan barang dan jasa;
- c. Menyiapkan penyelenggaraan rapat dan keprotokolan;
- d. Melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan keamanan kantor;
- e. Mengurus dan mencatat barang inventaris dan perlengkapan kantor;
- f. Melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi pengumpulan data kepegawaian, cuti, kenaikan pangkat, pensiun;



- g. Menyiapkan bahan dalam rangka upaya peningkatan disiplin pegawai;
  - h. Mengurus kesejahteraan pegawai;
  - i. Merencanakan pengelolaan arsip;
  - j. Melaksanakan tugas pelayanan administrasi publik; dan
  - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.
4. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan Evaluasi Dan Pelaporan Melaksanakan tugas dibidang pengelolaan keuangan, serta harta kekayaan asset kecamatan dan kelurahan, juga melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sub. Bagian Keuangan dan aset mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan dan mengolah bahan untuk Menyusun rencana Kegiatan Anggaran;
- b. Menyiapkan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
- c. Melaksanakan tata usaha keuangan;
- d. Memverifikasi dokumen pertanggungjawaban keuangan;
- e. Melaksanakan urusan tata usaha perjalanan dinas;
- f. Melaksanakan tata usaha gaji pegawai;
- g. Menghimpun Peraturan mengenai andimintrasi keuangan dan pelaksanaan anggaran;
- h. Menyusun laporan keuangan;
- i. Melaksanakan evaluasi dan mentoring aggaran;
- j. Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan program kegiatan;
- k. Menyiapkan data penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA);
- l. Menganalisa data, menyusun program kegiatan dan Rencana Kerja (RENJA);
- m. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program kegiatan;
- n. Menginventarisir data hasil kegiatan untuk bahan Menyusun laporan hasil kegiatan;
- o. Menghimpun data dan menyusun laporan monitoring, evaluasi hasil rencana kerja, realisasi fisik dan anggaran, Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD), Laporan



- Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati;
- p. Mengelola dokumentasi perjanjian kinerja;
  - q. Mengkoordinasikan, menghimpun pelaksanaan penyusunan Stándar Pelayanan (SP), Stándar Operasional Prosedur (SOP), dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
  - r. Menyiapkan data untuk Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP); dan
  - s. Melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

5. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melakukan urusan pemerintahan umum dan pemerintahan desa/kelurahan dan administrasi kependudukan serta melaksanakan kegiatan inventarisasi kekayaan Desa.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. Menyusun program kerja dan anggaran Seksi Pemerintahan;
- b. Menyusun program dan melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan Desa atau Kelurahan;
- c. Melaksanakan fasilitas rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- d. Melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- f. Menyusun program dan pembinaan di bidang pertanahan / keagrariaan;
- g. Mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum (Pemilu)
- h. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan perangkat / lembaga wilayah Desa/Kelurahan;
- i. Melaksanakan Fasilitasi kegiatan di bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;



- j. Menyusun Evaluasi dan melaporkan program kerja seksi pemerintahan ; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Seksi pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai tugas melakukan pembinaan pemberdayaan masyarakat di bidang perekonomian, pembangunan, lingkungan hidup dan pemberdayaan perempuan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan mempunyai tugas :

- a. Menyusun program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b. Memfasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan ;
- c. Melaksanakan fasilitas sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan desa (RPJMD Kab/kota-RPJMDes;
- d. Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- e. Memfasilitasi penyusunan perencanaan Pembangunan partisipatif;
- f. Fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- g. Memfasilitasi kegiatan PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga)
- h. Melaksanakan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
- i. Memfasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
- j. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan Kawasan perdesaan di wilayahnya;
- k. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan pemberdayaan masyarakat dan desa dibidang pemberdayaan, pembangunan, lingkungan hidup dan pemberdayaan perempuan;
- l. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang perbankan, koperasi dan perkreditan rakyat;



- m. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang usaha peternakan, perkebunan, perikanan dan pertanian;
- n. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang administrasi pengelolaan keuangan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Desa/Kelurahan;
- o. Menyusun evaluasi dan pelaporan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- p. Memfasilitasi pelaksanaan Musrenbang di Desa/Kelurahan;
- q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

7. Seksi Kemanana dan Ketertiban

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah, pembinaan politik dalam negeri serta pembinaan Perlindungan Masyarakat (LINMAS).

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan program kerja dan anggaran seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- b. Melaksanakan dan pembinaan ketertiban wilayah;
- c. Melaksanakan program dan pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas);
- d. Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta mempertahankan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. Mengkoordinasikan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Melaksanakan pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;



- g. Melaksanakan kegiatan pencegahan dalam menghadapi bencana alam dan bencana lainnya;
- h. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- i. Melaksanakan evaluasi dan melaporkan program kerja seksi ketentraman dan ketertiban; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

8. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melakukan pembinaan bidang Sosial Masyarakat serta kegiatan pengembangan sarana dan prasarana keagamaan, pendidikan, pariwisata, budaya, pemuda dan olahraga.

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Kesejahteraan Sosial;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan sosial masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan dalam rangka meningkatkan kegiatan dan peran serta Lembaga sosial masyarakat dan pelayanan sosial;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan kegiatan pengembangan sarana dan prasarana keagamaan;
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan peringatan hari besar nasional dan agama;
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan lembaga sosial masyarakat dan pembinaan di bidang pendidikan, kebudayaan dan pariwisata;
- h. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan wadah organisasi kepemudaan;
- i. Mengkoordinasikan pelaksanaan dan pembinaan di bidang olah raga dan wadah organisasi olah raga;
- j. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan kegiatan dalam rangka pengusulan dan pendistribusian



bantuan sosial kepada korban bencana alam dan bencana lainnya;

- k. Melaksanakan penyusunan evaluasi dan pelaporan program kerja Seksi Kesejahteraan Sosial; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

9. Kelompok Jabatan Fungsional

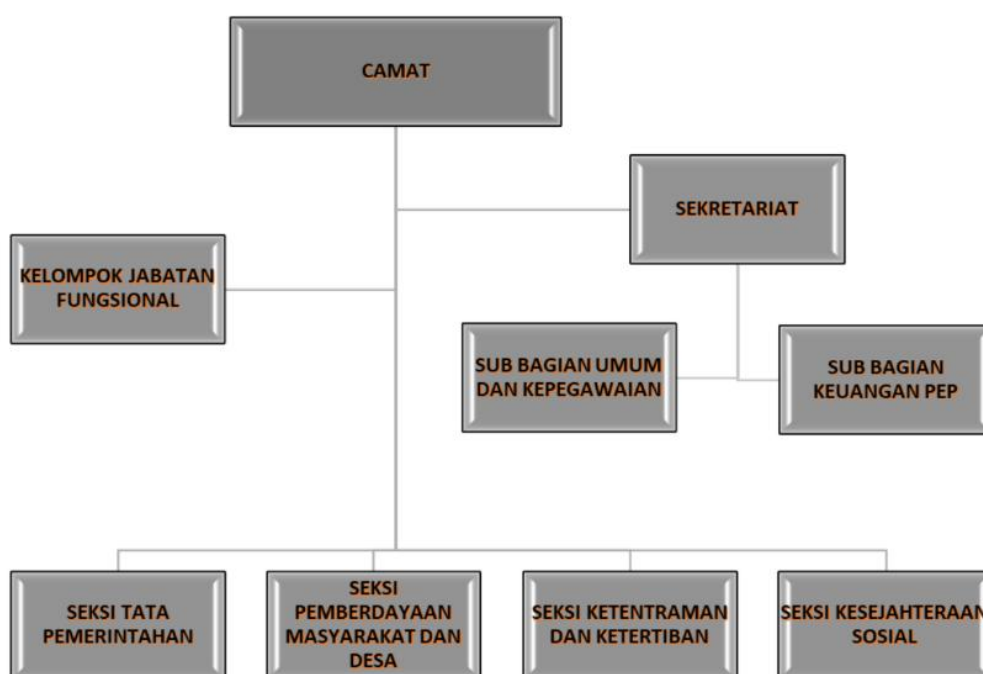
Kelompok Jabatan fungsional melaksanakan tugas dan kegiatan sesuai dengan keahlian.

3) STRUKTUR

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan, susunan organisasi Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat ;
- b. Sekretariat ;
- c. Seksi Tata Pemerintahan ;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum ;
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial ; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Struktur Organisasi Kecamatan Nguntoronadi**



Gambar 2.1 Struktur Organsisasi Kecamatan Nguntoronadi



## 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

### 1) Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan didukung Sumber Daya Manusia (ASN) dengan jumlah dan rincian sebagai berikut :

#### 1. Jumlah PNS Berdasarkan Golongan/Ruang

Tabel 2.1

Jumlah PNS Kecamatan Nguntoronadi Kab. Magetan berdasarkan Golongan/Ruang

No	Golongan/Ruang	Jumlah (orang)	
		Laki-Laki	Perempuan
1	IV/e	0	0
2	IV/d	0	0
3	IV/c	0	0
4	IV/b	0	0
5	IV/a	2	0
6	III/d	1	1
7	III/c	0	3
8	III/b	1	0
9	III/a	1	0
10	II/d	1	0
11	II/c	0	1
12	II/b	0	0
13	II/a	0	0
14	I/d	0	0
15	I/c	0	0
16	I/b	0	0
17	I/a	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>6</b>	<b>5</b>

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Nguntoronadi Kab. Magetan

#### 2. Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan/Eselon

Tabel 2.2

Jumlah ASN Kecamatan Nguntoronadi Kab. Magetan berdasarkan Jabatan/Eselon

No	Jabatan	Eselon	Jumlah (orang)	
			Laki-Laki	Perempuan
1	Camat	III.a	1	
2	Sekretaris	III.b	1	
3	Kepala Sub Bagian	IV.b		1
4	Kepala Seksi	IV.a	1	2
5	Pengelola Kepegawaian	-		1
6	Pengelola Keuangan	-		1
7	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	-	1	
8	Pengadministrasi Pemerintahan	-	1	
9	Pengadministrasi Umum	-	1	
10	Pengadministrasi Perkantoran	-	1	
11	Operator Layanan Operasional		1	
<b>Jumlah</b>			<b>8</b>	<b>5</b>

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat Kecamatan Nguntoronadi Kab. Magetan



3. Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 2.3

Jumlah ASN Kecamatan Nguntoronadi Kab. Magetan berdasarkan Jabatan/Eselon

No	Jabatan	Jumlah (orang)	
		Laki-Laki	Perempuan
1	Strata 2 (S2)	1	1
2	Strata 1 (S1)	3	3
3	Sarjana Muda (D3)	0	1
4	Diploma (D4)	0	0
5	SLTA	4	0
6	SLTP	0	0
7	SD	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>8</b>	<b>5</b>

4. Jumlah PNS yang telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan

Tabel 2.4

Jumlah ASN Kec. Nguntoronadi Kab. Magetan berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Diklat Kepemimpinan	Jumlah (orang)	
		Laki-Laki	Perempuan
1	Diklatpim Tk. III	1	
2	Adum/Adumla/Diklatpim Tk.IV	1	3
<b>Jumlah</b>		<b>2</b>	<b>3</b>

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Kec. Nguntoronadi Kab. Magetan

5. Jumlah PNS Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 2.5

Jumlah ASN Kec. Nguntoronadi Kab. Magetan berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenia Kelamin	Jumlah (orang)
1	Laki-Laki	8
2	Perempuan	5
<b>Jumlah</b>		<b>13</b>

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Kec. Nguntoronadi Kab. Magetan

6. Jumlah Pegawai berdasarkan Usia

Tabel 2.6

Jumlah ASN Kec. Nguntoronadi Kab. Magetan berdasarkan Jenis Kelamin

No	Rentang Usia	PNS		CPNS		PPP		NON ASN		JUMLAH
		L	P	L	P	L	P	L	P	
1	< 30 Tahun	-	1	-	-	-	-	-	-	1
2	30-39 Tahun	1	-	-	-	2	-	-	1	4
3	40-49 Tahun	3	3	-	-	-	-	1	-	7
4	> 50 Tahun	2	1	-	-	-	-	-	-	3
<b>JUMLAH</b>		<b>6</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>15</b>

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Kec. Nguntoronadi Kab. Magetan



## 2) Asset/Modal

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, aparatur Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan didukung oleh asset/modal sebagai berikut :

Tabel 2.7  
Daftar Aset Kecamatan Nguntoronadi Kab. Magetan

No	Nama Barang/ Jenis Barang	Nomor Register	Merk / Type	Tahun Perolehan	Ket.
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	0001	9000 M2	2007	BAIK
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	0001	990 M2	1980	BAIK
3	Gedung / Bangunan Parkir	0001	295 M2	2019	BAIK
4	Station Wagon	0001	SUZUKI GC415V APV DLX	2007	RUSAK RINGAN
5	Sepeda Motor	0001	SUZUKI EN 125	2005	RUSAK RINGAN
6	Sepeda Motor	0001	SUZUKI FL125 SD	2007	RUSAK RINGAN
7	Sepeda Motor	0001	SUZUKI FL125 SD	2008	RUSAK RINGAN
8	Sepeda Motor	0001	HONDA C 100 ML	2004	mutasi dari BPPKAD/ rusak ringan
9	Sepeda Motor	0001	YAMAHA 2 UP	2015	BAIK
10	Mesin Hitung Manual	0001		2009	Rusak
11	Lemari Besi/Metal	0001	brother B304	2016	RUSAK RINGAN
12	Lemari Besi/Metal	0001	Brother	2016	BAIK
13	Lemari Besi/Metal	0001-0002	Brother	2017	lemari arsip BAIK
14	Lemari Besi/Metal	0001	Brother	2018	BAIK
15	Lemari Kaca	0001		2018	display kaca BAIK
16	Lemari Kaca	0001		2021	
17	Papan Visuil	0001		2017	backdrop BAIK



No	Nama Barang/ Jenis Barang	Nomor Register	Merk / Type	Tahun Perolehan	Ket.
18	LCD Proyektor	0001	BenQ	2020	RUSAK RINGAN
19	LCD Proyektor	0001	EB W51 WXGA	2023	BAIK
20	Tripod Screen LCD Projector	0001		2021	Tripod LCD
21	Layar Proyektor	0001		2024	tribulan 1 BAIK
22	Lemari Kayu	0001-0002		2007	Rusak
23	Lemari Kayu	0001		2018	lemari buku BAIK
24	Meja Kayu/Rotan	0001		2017	RUSAK RINGAN
25	Meja Kayu/Rotan	0001		2017	meja pelayanan BAIK
26	Meja Kayu/Rotan	0001-0002		2019	BAIK
27	Meja Kayu/Rotan	0001	Meja HPL	2022	Meja pelayanan adminduk
28	Meja Kayu/Rotan	0001-0004		2023	BAIK
29	Kursi Besi / Metal	0001-0010	KURSI TAMAN	2022	TRI WULAN IV
30	Meja Rapat	0001-0002		2020	BAIK
31	Meja Rapat	0001		2020	BAIK
32	Meja Tulis	0001		2020	BAIK
33	Meja Resepsionis	0001		2018	BAIK
34	Meja Tambahan	0001		2018	meja arsip BAIK
35	Kursi Rapat	0001-0068		2008	Rusak ..
36	Kursi Rapat	0001-0010		2013	Rusak ..
37	Kursi Rapat	0001-0024	Futura	2018	BAIK
38	Kursi Rapat	0001-0010	Futura	2023	BAIK
39	Kursi Rapat	0001-0008	Ardent	2024	Belanja Semester I
40	Kursi Tamu	0001		2016	Rusak
41	Kursi Putar	0001-0004	Indhaci	2020	BAIK



No	Nama Barang/ Jenis Barang	Nomor Register	Merk / Type	Tahun Perolehan	Ket.
42	Kursi Biasa	0001-0025	NAPOLLY	2014	Rusak
43	Kursi Biasa	0001-0004	Activ	2018	RUSAK RINGAN
44	Kursi Biasa	0001-0015	Napoli	2023	kursi plastik
45	Kursi Biasa	0001-0027	Type 209	2024	Belanja Semester I
46	Bangku Tunggu	0001-0002		2017	BAIK
47	Meja Komputer	0001		2017	RUSAK RINGAN
48	Daun Pintu Alumunium	0001		2018	Pintu tempered glass BAIK
49	Mesin Potong Rumput	0001		2017	RUSAK RINGAN
50	Lemari Es	0001	sharp	2015	BAIK
51	AC Unit	0001	Panasonic	2016	Rusak ..
52	AC Unit	0001	Panasonic	2017	RUSAK RINGAN
53	AC Unit	0001-0003	Air Cooler Sanken	2024	BAIK
54	AC Split	0001	POLYTRON	2021	BAIK
55	AC Split	0001		2024	baik tribulan 4
56	Televisi	0001	samsung	2015	RUSAK RINGAN
57	Televisi	0001	Polytron	2017	BAIK
58	Televisi	0001	Panasonic	2018	BAIK
59	Sound System	0001	Lexus	2014	RUSAK
60	Sound System	0001	sound queen	2018	BAIK
61	Sound System	0001	MILAN M15	2022	BAIK
62	Camera Film	0001	Sony	2015	RUSAK
63	Gambar Presiden/wakil	0001		2005	Rusak ..
64	P.C. Unit	0001	LG	2017	BAIK
65	P.C. Unit	0001	SAMSUNG	2018	BAIK



No	Nama Barang/ Jenis Barang	Nomor Register	Merk / Type	Tahun Perolehan	Ket.
66	P.C. Unit	0001	INTEL CORE I5	2022	BAIK
67	P.C. Unit	0001	Axio desktop PC	2024	tribulan 3 baik
68	Lap Top	0001	Asus	2017	RUSAK RINGAN
69	Lap Top	0001	HP	2018	BAIK
70	Lap Top	0001	Asus	2019	BAIK
71	Note Book	0001	Asus	2015	BAIK
72	Note Book	0001		2016	RUSAK RINGAN
73	Hard Disk	0001		2010	flash disk Rusak ..
74	Hard Disk	0001		2009	FLASHDISK Rusak ..
75	Hard Disk	0001		2011	Flas Disk Rusak ..
76	Hard Disk	0001-0002		2011	Mouse Rusak ..
77	Hard Disk	0001		2012	Rusak ..
78	Hard Disk	0001	SONY CLASIE	2013	FLASDISK Rusak ..
79	Hard Disk	0001	TOSHIBA 8 GB	2013	FLASDISK Rusak ..
80	Printer	0001	officejet 7000	2011	
81	finger print	0001	nitgen	2014	BAIK
82	Monitor	0001	acer	2019	BAIK
83	Monitor	0001	LED IPS Borderless	2024	RUSAK RINGAN
84	Printer	0001	EPSON LX-310	2013	RUSAK RINGAN
85	Printer	0001	epson	2018	BAIK
86	Printer	0001	epson	2018	BAIK
87	Printer	0001	epson	2022	
88	Printer	0001	EPSON L120	2023	
89	Router	0001	UNIFY ACE PRO	2022	rusak



No	Nama Barang/ Jenis Barang	Nomor Register	Merk / Type	Tahun Perolehan	Ket.
90	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	0001-0003		2020	
91	Meja Tamu Biasa	0001		2019	BAIK
92	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	0001	KentKd104	2020	
93	Camera Digital	0001	Sony	2016	RUSAK RINGAN
94	Power Supply	0001		2007	RUSAK
95	Tripod Camera	0001		2021	tripod camera
96	Silde Projector	0001		2013	Layar LCD Rusak ..
97	Visualisasi Running Teks	0001		2022	BAIK
98	Teletype Scanner	0001	PLUTEC OPTIC	2015	RUSAK
99	Jaringan Telepon diatas Tanah Kapasitas Kecil	0001		2008	RUSAK
100	Kursi Ayunan	0001- 0002	AYUNAN MAINAN	2022	BAIK

Sumber data : Buku inventaris Kecamatan Nguntoronadi Kab Magetan Th. 2025



### **2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Kinerja pelayanan Kecamatan Nguntoronadi diukur melalui capaian indikator kinerja berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai pengampu urusan kewilayahan. Adapun kinerja pelayanan Kecamatan Nguntoronadi yang dapat disajikan adalah capaian kinerja tahun 2020-2024 sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 2.8  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Nguntoronadi Kab. Magetan Tahun 2020 – 2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya (IKU)	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	IKM Kecamatan			✓	79,50	80,00	80,50	81	81,5	79,82	79,89	90,21	88,39	92,75	1,01	1,003	1,12	1,09	1,13
2	Kecamatan Berpredikat Kinerja Baik			✓	-	61	65	-	-	-	65,1	65,1	-	-	-	1,06	1,002	-	-
3	Nilai Predikat Kinerja Kecamatan Nguntoronadi			✓	-	-	-	70	88	-	-	-	87,97	95,08	-	-	-	1,25	1,08
4	Nilai SAKIP Kecamatan Nguntoronadi			✓	-	-	-	-	85,15	-	-	-	-	85,15	-	-	-	-	1



Kecamatan Nguntoronadi menunjukkan kinerja pelayanan publik yang terus mengalami perbaikan, terutama dalam hal kecepatan, ketepatan, dan kemudahan layanan administrasi kepada masyarakat. Namun, tantangan masih ada dalam hal pemerataan kualitas layanan antar desa dan keterbatasan sumber daya. Upaya peningkatan transparansi, partisipasi masyarakat, dan inovasi pelayanan terus didorong untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih responsif dan akuntabel.

Pencapaian indikator kinerja pelayanan Kecamatan Nguntoronadi dari tahun 2020 hingga 2024, berdasarkan target renstra, realisasi capaian, dan rasio capaiannya, secara umum, sebagian besar indikator menunjukkan pencapaian yang sangat baik dengan rasio capaian 100%. Hal ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan oleh Kecamatan Nguntoronadi berhasil direalisasikan dengan efektif. Beberapa poin penting dari analisis:

✓ Skor IKM Kecamatan Nguntoronadi

IKM Kecamatan terus meningkat dari 79,82 (2020) menjadi 92,75 (2024), dengan capaian di atas 100% setiap tahun sejak 2020. Nilai ini tidak hanya menunjukkan peningkatan daritahun sebelumnya, tetapi juga dapat mencapai kategori A (Sangat Baik) pada tahun 2024. Hal ini membuktikan efektivitas berbagai reformasi pelayanan yang diimplementasikan.

Faktor pendorong tercapainya indikator kinerja Skkor IKM Kecamatan Nguntoronadi karena adanya komitmen dan konsistensi Pemerintah Kecamatan Nguntoronadi dalam mendengarkan aspirasi masyarakat dan terus menerus berinovasi untuk memberikan pelayanan yang prima.

✓ Nilai Predikat Kinerja Kecamatan

Indikator Nilai Predikat Kinerja Kecamatan merupakan suatu instrumen pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat efektivitas, efisiensi, dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan. Indikator ini bertujuan untuk menyediakan gambaran yang jelas, terukur, dan dapat dibandingkan mengenai kinerja suatu kecamatan dari waktu ke waktu, sekaligus sebagai dasar untuk perencanaan strategis, alokasi sumber daya, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.



Nilai predikat kinerja Kecamatan Nguntoronadi mengalami peningkatan yang signifikan, dari 65,1 pada tahun 2021 menjadi 95,08 pada tahun 2024.

Faktor pendorong meningkatnya nilai predikat kinerja kecamatan yakni dikarenakan adanya perbaikan signifikan dalam kualitas pelayanan publik pada Kecamatan Nguntoronadi.

✓ Nilai SAKIP Kecamatan Nguntoronadi

SAKIP mengevaluasi keseluruhan siklus manajemen kinerja sebuah instansi pemerintah. Penilaiannya mencakup beberapa elemen diantaranya: Perencanaan Kinerja , Pengukuran Kinerja ,Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja internal.

Indikator nilai SAKIP menunjukkan tren positif dengan capaian 100%, hal ini mencerminkan akuntabilitas dan efisiensi yang baik.

Faktor pendorong tercapainya target kinerja Nilai SAKIP pada Kecamatan Nguntoronadi yakni karena adanya perbaikan sistem kinerja di Lingkungan Kecamatan Nguntoronadi, serta adanya komitmen bersama seluruh karyawan Kecamatan Nguntoronadi untuk terus melakukan perbaikan khususnya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Tabel 2.9  
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Nguntoronadi

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	204.187.200					197.394.790					96,67						
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	105.012.800					101.467.267					96,62						
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.000.000					5.000.000					100,00						
Program Peningkatan Kelembagaan Kecamatan	95.800.000					94.090.000					98,22						

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		1.708.192.530	1.704.663.590	1.685.412.605	1.887.898.528		1.328.726.958	1.606.997.965	1.655.014.286	1.829.137.541		77,79	94,27	98,20	96,89	0,11	0,38
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		17.165.450	20.600.000	32.949.700	37.169.550		16.185.000	20.504.000	31.343.800	36.675.500		94,29	99,53	95,13	98,67	1,17	1,27
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		19.789.050	31.705.100	41.696.250	50.000.000		14.716.350	31.662.750	41.618.500	49.890.050		74,37	99,87	99,81	99,78	1,53	2,39
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		17.358.250	39.559.900	45.124.600	98.397.950		15.112.500	37.094.250	44.934.000	97.643.500		87,06	93,77	99,58	99,23	4,67	5,46
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		11.178.350	12.000.000	8.482.300	19.000.000		9.591.000	11.989.200	8.467.900	18.700.250		85,80	99,91	99,83	98,42	0,70	0,95



- ✓ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  
Realisasi anggaran pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Meskipun terdapat sedikit penurunan pada tahun 2024 sebesar 1,31% dibanding tahun 2023, namun secara keseluruhan tingkat serapan anggaran menunjukkan konsistensi yang sangat baik.

Hal ini terjadi karena program tersebut dikelola dengan baik, dan dengan disiplin anggaran yang kuat, sehingga fluktuasi penganggaran tidak mengganggu kinerja operasional secara keseluruhan.

- ✓ Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik  
Berdasarkan data anggaran dan realisasi Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dari tahun 2021 hingga 2024, menunjukkan realisasi anggaran secara konsisten mencapai persentase serapan dengan rata-rata 96,5%. Serapan anggaran dari tahun ke tahun secara konsisten mengalami kenaikan yang mengindikasikan adanya efisiensi dan efektivitas yang tinggi dalam pelaksanaan program.

Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti efisiensi belanja, optimalisasi biaya, dan kemungkinan penyesuaian teknis selama pelaksanaan, sehingga selisih antara anggaran dan realisasi tidak mencerminkan inefisiensi, melainkan perencanaan yang akurat dan pengelolaan keuangan yang hati-hati dalam memastikan setiap anggaran yang dialokasikan memberikan nilai manfaat optimal tanpa terjadinya pemborosan.

- ✓ Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan  
Selama periode 2021 hingga 2024, Program Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan menunjukkan tren realisasi anggaran yang stabil dan berada pada kategori tinggi. Berdasarkan data anggaran dan realisasi Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dari tahun 2021 hingga 2024, terjadi peningkatan serapan anggaran yang signifikan pada tahun 2022 yakni dari 74,34% menjadi 99,87% dan terus mengalami peningkatan yang stabil hingga 2024. Hal ini menunjukkan adanya bahwa program ini dikelola dengan perencanaan yang semakin matang, pengawasan yang ketat, dan adaptasi yang baik terhadap



dinamika anggaran, sehingga setiap alokasi yang disediakan dapat dimanfaatkan secara hampir optimal untuk mendukung pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

✓ Program Koordinasi Kemanana dan Ketertiban Umum

Berdasarkan data anggaran dan realisasi Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dari tahun 2021 hingga 2024, alokasi anggaran mengalami peningkatan signifikan sebesar 179% dari Rp 17.358.250 pada tahun 2021 menjadi Rp 97.397.950 pada tahun 2024, menunjukkan peningkatan prioritas dalam menjaga ketertiban umum. Serapan anggaran dari tahun ke tahun juga terus mengalami kenaikan dan stabil hingga akhir tahun 2024 di 99,23%. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti, optimalisasi biaya dan perencanaan yang matang, sehingga selisih antara anggaran dan realisasi tidak mencerminkan inefisiensi, melainkan perencanaan yang akurat dan pengelolaan keuangan yang hati hati dalam memastikan setiap anggaran yang dialokasikan memberikan nilai manfaat optimal.

✓ Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Realisasi anggaran pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan desa pada tabel diatas, menunjukkan kinerja penyerapan yang sangat baik dengan rata-rata di atas 95%. Selain itu presentase serapan anggaran juga terus mengalami perbaikan dari tahun ke tahun, dengan presentase akhir di angka 98,42%. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kinerja dan adanya optimalisasi biaya serta perencanaan yang terukur, sehingga anggaran dapat diserap dengan baik dan sesuai target kinerja.

#### **2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan**

Sebagai Organisasi Perangkat daerah, Kecamatan berfungsi sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Daerah dan berinteraksi langsung dengan Masyarakat. Kelompok Sasaran Layanan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Nguntoronadi yaitu masyarakat di wilayah Kecamatan Nguntoronadi. Kecamatan memiliki beberapa jenis layanan yakni Optimalisasi sarana dan prasarana pelayanan publik, Optimalisasi sosialisasi dan penyuluhan terkait pelayanan publik di Kecamatan, serta Optimalisasi penyelesaian pengaduan Masyarakat terkait pelayanan publik, Secara umum , kelompok Masyarakat tersebut



mencakup semua warga negara Indonesia, baik yang berdomisili tetap maupun tidak tetap, yang berada dalam batas wilayah administrasi kecamatan. Penduduk Kecamatan meliputi semua orang yang secara sah terdaftar sebagai penduduk kecamatan, termasuk anak-anak, orang dewasa, lanjut usia, dan penyandang disabilitas. Dengan demikian, pelayanan kecamatan mencakup seluruh penduduk di wilayah tersebut, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dan meningkatkan kualitas hidup.

#### **2.1.5 Mitra Perangkat Daerah**

Dalam pemberian layanan Kecamatan dalam beberapa layanan bekerja sama dengan beberapa perangkat daerah yang ada di wilayah Kecamatan Nguntoronadi maupun perangkat daerah yang berada di luar wilayah Kecamatan Nguntoronadi antara lain:

- a. Polsek Nguntoronadi untuk menyediakan layanan keamanan, penegakkan hukum dan ketertiban masyarakat serta membantu penanganan konflik sosial, kriminalitas, serta kegiatan pengamanan acara di masyarakat.
- b. Pos Ramil Nguntoronadi untuk membantu dalam aspek pertahanan dan keamanan, serta kegiatan sosial masyarakat.
- c. Puskesmas Nguntoronadi untuk melakukan pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan dan pengurusan BPJS Kesehatan untuk masyarakat yang tidak mampu.
- d. Kantor Urusan Agama untuk melakukan pengurusan Dispensasi Nikah yaitu dibutuhkan jika pernikahan mendadak ingin dilakukan, terutama jika salah satu atau kedua calon mempelai belum memenuhi syarat usia pernikahan atau masih dibawah umur.
- e. Pemerintah Desa dalam rangka optimalisasi koordinasi dan fasilitasi Penyelenggaraan pemerintahan dan perencanaan pembangunan Desa / Kelurahan.

#### **2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah**

Dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya Kecamatan tidak memiliki dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.



### **2.1.7 Kerjasama Daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah**

Tanggung jawab perangkat daerah dalam kerjasama daerah mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan kerjasama, baik dengan daerah lain (KSDD) maupun dengan pihak ketiga (KSDPK), seperti dalam bidang pelayanan publik, ekonomi, infrastruktur, dan lingkungan. Dalam hal ini Kecamatan Nguntoronadi tidak memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan Kerjasama Daerah.

## **2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah**

### **a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan menghadapi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelayanan publik di kecamatan
  - a) keterbatasan sarana prasarana Pelayanan seperti kendaraan operasional, peralatan teknologi informasi, dan fasilitas pendukung lainnya yang mengurangi efisiensi kerja dan menghambat responsivitas pelayanan.
  - b) Belum optimalnya kolaborasi antar perangkat penyelenggara layanan dalam mencapai tujuan kinerja pelayanan.
2. Belum optimalnya koordinasi dan Fasilitasi pembangunan Desa / Kelurahan  
Koordinasi antarinstansi vertikal (seperti POLSEK, KORAMIL) dan horizontal (dinas-dinas daerah) di wilayah kecamatan masih sering terkendala oleh ego sektoral dan mekanisme kerja yang belum terintegrasi secara optimal.
3. Masih Rendahnya Kapasitas dan Kualitas SDM aparatur Kecamatan  
Tuntutan transparansi dan partisipasi publik dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan menuntut kecamatan untuk beradaptasi dan mengadopsi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yang memerlukan perubahan mindset dan kapabilitas aparatur.
4. Belum optimalnya Pembangunan wilayah Desa/Kelurahan di Kecamatan karena kurangnya adaptasi Kecamatan terhadap dinamika kewilayahan yang sangat dinamis



**b. Isu Strategis**

Isu strategis merupakan fenomena atau permasalahan yang belum tertangani secara optimal dalam periode lima tahun sebelumnya, serta menjadi pekerjaan rumah yang perlu ditindaklanjuti dalam Rencana Strategis (Renstra) saat ini. Selain itu, isu strategis juga lebih berorientasi pada kondisi yang berupa potensi masalah atau peluang yang perlu diantisipasi di masa depan.

Penetapan isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan didasarkan pada hasil reviu terhadap berbagai aspek strategis. Reviu singkat terhadap aspek-aspek tersebut disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.7 Perumusan Isu Strategis Kecamatan Nguntoronadi

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi memfokuskan pembangunan desa/kelurahan	Belum optimalnya pelayanan publik di kecamatan	Belum optimalnya kelembagaan, birokrasi, serta transparansi informasi dan komunikasi publik	Tuntutan tata kelola pemerintahan yang efektif dan adaptif dalam menghadapi era globalisasi dan keterbukaan.	Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan	Peningkatan pemanfaatan inovasi dengan memanfaatkan teknologi informasi pelayanan publik
	Belum optimalnya koordinasi dan Fasilitasi pembangunan Desa / Kelurahan		Globalisasi ekonomi dan teknologi digital yang mendorong perubahan cepat dalam pola sosial-ekonomi wilayah	Agenda transformasi digital nasional yang mengubah pola pelayanan, ekonomi, dan interaksi kewilayahan	Kurangnya kolaborasi antar sektor dan stakeholder	Optimalisasi kolaborasi dan koordinasi serta fasilitas terkait Pembangunan desa/kelurahan



### BAB III

## TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

Hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan sebuah keterkaitan yang bersifat hirarkis dan sistematis. Visi menjadi arah utama pembangunan, misi menjadi strategi pencapaiannya, tujuan sebagai tolok ukur keberhasilan, dan sasaran menjadi target konkret yang harus dicapai. Dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang efektif, pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan harapan. Pada periode RPJMD baru ini, Visi pembangunan daerah Kabupaten Magetan pada periode RPJMD 2025- 2029 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

### **“MAGETAN NYAMAN, MAJU, DAN BERKELANJUTAN”**

**MAGETAN NYAMAN**, mencerminkan harapan untuk menciptakan kehidupan yang aman, tenteram, dan sejahtera bagi seluruh masyarakat Kabupaten Magetan. Kata "nyaman" mencakup aspek sosial, ekonomi, lingkungan dan psikologis.

**MAGETAN MAJU**, mencerminkan tekad untuk mengantarkan Kabupaten Magetan menjadi wilayah yang berkembang pesat dalam berbagai aspek, baik ekonomi, infrastruktur, sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan hingga peningkatan kualitas hidup masyarakat.

**MAGETAN BERKELANJUTAN**, mencerminkan komitmen Kabupaten Magetan untuk melaksanakan pembangunan yang memperhatikan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Magetan tahun 2024-2029 tersebut di atas akan dapat terwujud dengan serangkaian Misi sebagai berikut:

1. SDM ANDAL - Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang Andal dan Berdaya Saing Kuat
2. KOMODITAS UNGGUL - Mengembangkan Sektor Pertanian, Mendorong Hilirisasi Produk Unggulan Berbasis UMKM, Koperasi untuk Memantapkan Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan
3. BIROKRASI TANGGAP - Membangun Birokrasi Pemerintahan yang Profesional, Responsif, Adaptif dan Transparan
4. MASYARAKAT SEJAHTERA - Meningkatkan Kesejahteraan dengan Pengentasan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Masyarakat, Perlindungan Sosial dan Pembangunan Wilayah Perdesaan
5. EKONOMI KUAT - Peningkatan Daya Tarik Investasi, Ekonomi Kreatif, Pariwisata, Perluasan Lapangan Kerja dan Menumbuhkan Kewirausahaan untuk Menurunkan Pengangguran
6. INFRASTRUKTUR MANTAP - Membangun Infrastruktur Strategis untuk Meningkatkan Keterhubungan antar Wilayah
7. MAGETAN HARMONIS - Membangun Kehidupan Masyarakat yang “Guyub Rukun”, Aman, Tenteram berasaskan Nilai Agama dan Budaya



serta Menjaga Harmoni Lingkungan Hidup dan Mendorong Pengembangan Ekonomi Hijau.

Dalam kerangka perencanaan strategis, Misi Politik sejumlah 7 misi sebagaimana telah dijelaskan di atas, ditransformasikan menjadi 4 tujuan guna menyederhanakan penyusunan arsitektur kinerja pembangunan. Proses transformasi ini dilakukan dengan tetap mempertahankan esensi dan makna orisinal dari masing-masing Misi Kepala Daerah. Secara lengkap diuraikan dalam tabel berikut:

<b>VISI</b>	<b>MAGETAN NYAMAN, MAJU, DAN BERKELANJUTAN</b>	
<b>MISI</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>
1. SDM ANDAL - Membangun SDM yang Andal dan Berdaya Saing Kuat 7. MGETAN HARMONIS - Membangun Kehidupan Masyarakat yang “Guyub Rukun”, Aman, Tenteram beraskan Nilai Agama dan Budaya serta Menjaga Harmoni Lingkungan Hidup dan Mendorong Pengembangan Ekonomi Hijau	Terwujudnya SDM Unggul, Berdaya Saing dan Harmonis	1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan 2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 3. Meningkatnya Pembangunan Berwawasan Kependudukan 4. Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Berasaskan Nilai Agama
2. KOMODITAS UNGGUL - Mengembangkan Sektor Pertanian, Mendorong Hilirisasi Produk Unggulan Berbasis UMKM, Koperasi untuk Memantapkan Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan 5. EKONOMI KUAT - Peningkatan Daya Tarik Investasi, Ekonomi Kreatif, Pariwisata, Perluasan Lapangan Kerja dan Menumbuhkan Kewirausahaan untuk Menurunkan Pengangguran 6. INFRASTRUKTUR MANTAP - Membangun Infrastruktur Strategis untuk Meningkatkan Keterhubungan antar Wilayah 7. MAGETAN HARMONIS - Membangun Kehidupan Masyarakat yang "Guyub Rukun", Aman, Tenteram beraskan Nilai Agama dan Budaya serta Menjaga Harmoni Lingkungan Hidup dan Mendorong Pengembangan Ekonomi Hijau	Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan	1. Meningkatnya Investasi Daerah 2. Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Infrastruktur Daerah 3. Meningkatnya Kemandirian Sektor Pertanian Berbasis Industri dan Perdagangan 4. Meningkatnya Kualitas Lingkungan yang Berkelanjutan 5. Menurunnya Angka Pengangguran melalui Perluasan Lapangan Kerja dan Menumbuhkan Kewirausahaan
3. BIROKRASI TANGGAP – Membangun Birokrasi Pemerintahan yang Profesional, Adaptif, dan Transparan	Terciptanya Birokrasi Pemerintahan yang Profesional, Adaptif dan Transparan	1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah 2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik 4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik 5. Meningkatnya Kualitas ASN 6. Meningkatnya Daya Saing dan Inovasi Daerah
4. MASYARAKAT SEJAHTERA - Meningkatkan Kesejahteraan dengan Pengentasan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Masyarakat, Perlindungan Sosial dan Pembangunan Wilayah Perdesaan	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	1. Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan 2. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Miskin dan Rentan 3. Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah

Sesuai tugas dan fungsi pokoknya, Kecamatan Nguntoronadi mempunyai peran untuk mensukseskan tujuan ke 3 “*Terciptanya Birokrasi Pemerintahan*



yang Profesional, Adaptif dan Transparan” dengan sasaran “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”.

### 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2025-2029

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2025–2029 maka disusunlah tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Nguntoronadi beserta target tahunan yang menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah ini dimaksudkan untuk mempermudah penetapan indikator kinerja dan target tahunan secara terarah dan terukur. Tujuan dan sasaran Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1  
Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan Tahun 2025-2030

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>NSPK:</b> Melaksanakan Kewenangan Pemerintah Daerah Urusan Kewilayahan  <b>Sasaran RPJMD yang relevan:</b> Meningkatnya kualitas pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan pemerintahan di wilayah kecamatan Nguntoronadi		Indeks Kepuasan Masyarakat    Skor	93	93,10	93,20	93,30	93,40	93,50	IKU
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Nguntoronadi	Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan    Nilai	95,10	95,20	95,30	95,40	95,50	95,60	IKU
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Nguntoronadi	Nilai SAKIP    Nilai	85,25	89,50	89,60	89,70	89,80	89,90	IKU



### 3.2 Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Strategi Renstra adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah atau upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Nguntoronadi. Penahapan pembangunan merupakan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Nguntoronadi. Penahapan Renstra Kecamatan Nguntoronadi seperti tabel di bawah ini :

Tabel 3.2  
Penahapan Strategi Kecamatan Nguntoronadi

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Digitalisasi dan Teknologi (penguatan akses internet, digitalisasi layanan pemerintahan, serta inovasi dalam administrasi publik)	Infrastruktur (pembangunan sarana prasarana publik)	Peremberdayaan Masyarakat (pelatihan keterampilan dan optimalisasi organisasi pemberdayaan masyarakat)	Pendalaman Evaluasi sistem, penyempurnaan berkelanjutan, dan inovasi layanan untuk mendukung konsistensi pelayanan public dan koordinasi fasilitasi kewilayahan	Penyelesaian target indikator strategis, evaluasi akhir pelaksanaan Renstra supaya tercapai peningkatan Kualitas pelayanan publik dan pemerintahan di wilayah Kecamatan



### 3.3 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Arah kebijakan Kecamatan Nguntoronadi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra disajikan dalam tabel sbb:

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Melaksanakan Kewenangan Pemerintah Daerah Urusan Kewilayahan	Memfasilitasi program pemberdayaan Masyarakat di setiap lingkungan RT	Peningkatan penguatan tata kelola pemerintahan melalui modernisasi administrasi pemerintahan dan penguatan sistem pengawasan internal dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi kecamatan	
			Peningkatan Kapasitas Aparatur melalui Pengembangan Kompetensi Aparatur dan Penguatan Budaya Kerja Inovatif	
			Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pelayanan publik di wilayah Kecamatan	
			Optimalisasi partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan wilayah dan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan melalui Penguatan Mekanisme Musrenbang dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan	
			Optimalisasi pelayanan publik melalui standarisasi layanan publik serta pengembangan inovasi pelayanan	



## BAB IV

### PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

#### 4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah hasil Cascading dari Tujuan, Sasaran, Outcome dan Output

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Nguntoronadi yang telah ditetapkan maka Perangkat Daerah melaksanakan program, kegiatan dan sub-kegiatan. Program, kegiatan dan sub-kegiatan merupakan hasil *cascading* dari pohon kinerja dalam penentuan *final outcome*, *intermediate outcome*, *outcome* dan *output* dalam mencapai kinerja Kecamatan Nguntoronadi mulai tahun 2025 s.d 2030. Secara lengkap pengambilan program, kegiatan dan sub-kegiatan disajikan dalam tabel sebagaimana berikut :

Tabel 4.1 Perumusan Program, Kegiatan, Sub-Kegiatan Kecamatan Nguntoronadi

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOMES</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN</b>	<b>KET</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>NSPK:</b> Melaksanakan Kewenangan Pemerintah Daerah Urusan Kewilayahan  Sasaran: Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan pemerintahan di wilayah kecamatan				Indeks Kepuasan Masyarakat		
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Nguntoronadi			Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOMES	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			<b>Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan lembaga pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Nguntoronadi</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nilai indeks Pelayanan Publik</li> <li>2. Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat desa / kelurahan serta aparatur pemerintah desa yang sesuai prosedur dan tertib administrasi</li> </ol>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	
				<p><i>Terlaksananya pelayanan administrasi, perpajakan, perizinan, dan Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang efektif di kecamatan</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah koordinasi dan fasilitasi pelayanan adminduk , pajak PBB dan perizinan yang dilaksanakan secara efektif</li> <li>2. jumlah koordinasi dan fasilitasi pembinaan lembaga kemasyarakatan desa / kelurahan serta aparatur pemerintah desa yang dilaksanakan secara efektif</li> </ol>	<p><i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i></p>	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOMES	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya dokumen pelayanan administrasi kependudukan, perpajakan, perizinan, dan administrasi perangkat serta Lembaga Pemberdayaan Desa/ Kelurahan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			<b>Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Bidang Sosial di Kecamatan Nguntoronadi</b>		<b>Persentase Efektivitas Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Sosial</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	
				<i>Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi layanan sosial, pembangunan SDM, serta penanganan bencana yang efektif</i>	<i>Jumlah fasilitasi layanan sosial, pembangunan SDM, serta penanganan bencana</i>	<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOMES	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya laporan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat bidang kesejahteraan sosial, kepemudaan, kesehatan , keluarga berencana dan penanganan bencana.	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			<b>Terciptanya ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan Nguntoronadi</b>		<b>Persentase penyelesaian potensi gangguan kamtibmas di wilayah kecamatan</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	
				<i>Terlaksananya koordinasi Trantibmas di tingkat kecamatan (Forkopimca)</i>	<i>Jumlah koordinasi trantibmas dan penegakan perda yang dilaksanakan secara efektif</i>	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOMES	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Laporan koordinasi Kamtibmas, penegakan Perda dan pembinaan persatuan kesatuan bangsa di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI , Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
			<b>Meningkatnya kualitas kinerja Pemerintahan Desa dan pembangunan wilayah Kecamatan secara partisipatif di Kecamatan Nguntoronadi</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li><b>Persentase Desa mandiri di wilayah kecamatan</b></li> <li><b>Persentase usulan musrenbang desa / Kelurahan yang sesuai ketentuan dan diakomodir kecamatan</b></li> </ol>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	
				<i>Terlaksananya tahapan perencanaan dan penganggaran pemerintah desa serta pembangunan wilayah yang berkualitas</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li><i>Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran desa yang disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan</i></li> <li><i>Persentase usulan musrenbang desa / Kelurahan yang sesuai</i></li> </ol>	<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOMES	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					<i>ketentuan dan diakomodir kecamatan</i>		
				<i>Tersedianya dokumen Pemerintahan serta pembangunan desa yang berkualitas</i>	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
		<b>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Nguntoronadi</b>			<b>Nilai SAKIP</b>		
			<b>Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui birokrasi yang profesional serta pelayanan administrasi public yang efektif dan</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li><b>Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan</b></li> <li><b>Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran</b></li> </ol>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOMES	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			<b>efisien pada Kecamatan Nguntoronadi</b>				
				<i>Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Kecamatan Nguntoronadi</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	
				Tersusunnya Draft Analisis Data Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Draft Analisis Data Evaluasi Kinerja dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOMES	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				<i>Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan dan pelaksanaan anggaran yang sesuai perencanaan</i>	<i>Persentase Deviasi Serapan Anggaran</i>	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	
				Tersedianya Dokumen Pengajuan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersedianya Bahan Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				<i>Terkelolanya Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Penyediaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOMES	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	<i>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	
				<i>Terlaksananya Pelayanan Kepegawaian Kecamatan Nguntoronadi</i>	<i>Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai Prosedur</i>	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	
				Terkelolanya dokumen kepegawaian perangkat daerah	<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	<i>Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Peningkatan SDM Perangkat daerah	<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	
				<i>Tersedianya Barang dan Jasa Pendukung Kinerja Kecamatan Nguntoronadi</i>	<i>Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOMES</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN</b>	<b>KET</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terkelolanya Barang yang mendukung Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Terkelolanya Barang yang mendukung Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Terkelolanya Barang yang mendukung Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Terkelolanya Barang yang mendukung Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Terkelolanya Barang yang mendukung Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOMES	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terkelolanya Barang yang mendukung Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Terlaksananya Fasilitasi Penunjang kegiatan Perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				<i>Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran pendukung Kinerja Kecamatan Nguntoronadi</i>	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	
				Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOMES	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				<i>Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran pendukung Kinerja Kecamatan Nguntoronadi</i>	<i>Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah</i>	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	
				Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

#### 4.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah mengacu pada Nomenklatur

Untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub-kegiatan untuk lima tahun ke depan maka ditetapkanlah pagu anggaran dan target anggaran yang nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka pendek Kecamatan Nguntoronadi.

Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub-kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Nguntoronadi tahun 2026-2030

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KEGIATAN/ SUB- KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE	LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket	
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
-1	-2	-3		-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-16	
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<i>Kepuasan ASN Kecamatan Magetan terhadap Layanan Kesekretariatan    Skor</i>	80	81,5												
	<i>Outcome : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui birokrasi yang profesional serta pelayanan administrasi publik yang efektif dan efisien pada Kecamatan Nguntoronadi</i>	80	81,5	85,5		86		86,5		87		87,5			
	<i>Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran    %</i>	89,5	90	90,5	1.927.252.659	91	2.023.615.292	91,5	2.124.796.056	92	2.231.035.858	92,5	2.342.587.651		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KEGIATAN/ SUB- KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE  LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											Ket
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-16	
<i>Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>  <i>Output : Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Kecamatan Nguntoronadi</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah    Dokumen</i>	18	18	51	9.500.000	51	12.000.000	51	14.000.000	51	16.000.000	51	18.000.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  Output : Tersusunnya Draft Analisis Data Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah    Dokumen	6	6	6	5.500.000	6	7.000.000	6	8.000.000	6	9.000.000	6	10.000.000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  Output : Tersedianya Draft Analisis Data Evaluasi Kinerja dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah    Laporan	12	12	45	4.000.000	45	5.000.000	45	6.000.000	45	7.000.000	45	8.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KEGIATAN/ SUB- KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE	LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket	
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
-1	-2	-3		-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-16	
<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>  <i>Output : Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan dan pelaksanaan anggaran yang sesuai perencanaan</i>	<i>Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah    %</i>	44	44												
	<i>Persentase Deviasi Serapan Anggaran Perangkat Daerah    %</i>	10,5	10	9,5	1.563.141.369	9	1.594.641.369	8,5	1.645.622.133	8	1.694.461.935	7,5	1.755.461.935		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  Output : Tersedianya Dokumen Pengajuan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN    Orang/bulan	312	312	336	1.560.641.369	336	1.590.641.369	336	1.640.622.133	336	1.688.461.935	336	1.748.461.935		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KEGIATAN/ SUB- KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE  LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											Ket
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
-1	-2	-3		-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-16
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD  Output : Tersedianya Bahan Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD    Laporan	18	18	44	2.500.000	44	4.000.000	44	5.000.000	44	6.000.000	44	7.000.000	
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>  <b>Output :</b> <b>Terkelolanya barang milik daerah pada perangkat daerah</b>	<b>Jumlah Pengelolaan Barang milik daerah sesuai prosedur    Bulan</b>	12	-	-	-	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  Output : Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD    Laporan	12	-	-	-	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KEGIATAN/ SUB- KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE  LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											Ket
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-16	
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>  <b>Output :</b> <b>Terlaksananya Pelayanan Kepegawaian Kecamatan Nguntoronadi</b>	<b>Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai Prosedur     Orang</b>	12	-	-	-	12	15.000.000	12	15.000.000	12	20.000.000	12	27.000.000	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian  Output: Terkelolanya dokumen kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian     Dokumen	5	-	-	-	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	5	7.000.000	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi  Output : Terlaksananya Bimbingan Teknis Peningkatan SDM Perangkat daerah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan     Orang	13	-	-	-	13	10.000.000	13	10.000.000	13	15.000.000	13	20.000.000	
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  <b>Output:</b> <b>Tersedianya Barang dan Jasa Pendukung Kinerja Kecamatan Nguntoronadi</b>	<b>Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah     Bulan</b>	12	12	12	172.281.932	12	210.630.315	12	234.230.315	12	261.230.315	12	289.382.108	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KEGIATAN/ SUB- KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE	LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket	
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
-1	-2	-3		-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-16	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  Output : Terkelolanya Barang yang mendukung Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan    Paket	12	12	12	3.000.000	12	3.000.000	12	4.000.000	12	5.000.000	12	7.000.000		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  Output : Terkelolanya Barang yang mendukung Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan    Paket	12	12	12	67.261.932	12	89.110.315	12	90.710.315	12	95.710.315	12	98.362.108		
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  Output : Terkelolanya Barang yang mendukung Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan    Paket	12	12	12	6.500.000	12	7.000.000	12	8.000.000	12	9.000.000	12	10.000.000		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor  Output : Terkelolanya Barang yang mendukung Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan    Paket	12	12	12	30.000.000	12	40.000.000	12	50.000.000	12	60.000.000	12	72.000.000		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KEGIATAN/ SUB- KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE  LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											Ket
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-16	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  Output : Terkelolanya Barang yang mendukung Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan    Paket	12	12	12	8.000.000	12	9.000.000	12	9.000.000	12	9.000.000	12	9.500.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan  Output : Terkelolanya Barang yang mendukung Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan    Dokumen	12	12	12	2.520.000	12	2.520.000	12	2.520.000	12	2.520.000	12	2.520.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  Output : Terkelolanya Barang yang mendukung Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD    Laporan	12	12	12	55.000.000	12	60.000.000	12	70.000.000	12	80.000.000	12	90.000.000	
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  <b>Output :</b> <b>Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran pendukung Kinerja Kecamatan Nguntoronadi</b>	<b>Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah    Laporan</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>94.746.808</b>	<b>36</b>	<b>99.746.808</b>	<b>36</b>	<b>111.346.808</b>	<b>36</b>	<b>114.746.808</b>	<b>36</b>	<b>120.146.808</b>	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KEGIATAN/ SUB- KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE	LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket	
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
-1	-2	-3		-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-16	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  Output : Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan    Laporan	12	12	12	15.999.208	12	19.999.208	12	24.999.208	12	24.999.208	12	26.999.208		
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor  Output : Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan    Laporan	12	12	12	5.947.600	12	6.947.600	12	7.947.600	12	9.947.600	12	11.947.600		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  Output : Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan    Laporan	12	12	12	72.800.000	12	72.800.000	12	78.400.000	12	79.800.000	12	81.200.000		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KEGIATAN/ SUB- KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE	LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket	
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
-1	-2	-3		-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-16	
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  <b>Output :</b> <b>Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran pendukung Kinerja Kecamatan Nguntoronadi</b>	<b>Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah    Unit</b>	10	10	10	87.582.550	10	88.596.800	10	101.596.800	10	121.596.800	10	129.596.800		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan  Output: Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya    Unit	9	9	9	46.596.800	9	51.596.800	9	54.596.800	9	59.596.800	9	62.596.800		
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  Output: Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi    Unit	1	1	1	40.985.750	1	37.000.000	1	47.000.000	1	62.000.000	1	67.000.000		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KEGIATAN/ SUB- KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE	LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket	
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
-1	-2	-3		-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-16	
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>  <i>Outcome: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Lembaga Masyarakat serta Aparatur Desa di Wilayah Kecamatan Nguntoronadi</i>	<i>Persentase Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan    %</i>	100	100												
	<i>Nilai Indeks Pelayanan Publik    Indeks</i>	3,6	3,6	3,7	6.988.627	3,8	7.338.058	3,9	7.704.961	4,0	8.090.209	4,1	8.494.719		
	<i>Persentase lembaga kemasyarakatan desa / kelurahan serta aparatur pemerintah desa yang sesuai prosedur dan tertib administrasi    %</i>	100	100	100		100		100		100		100			
<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>  <b>Output:</b> Terlaksananya pelayanan administrasi, perpajakan, perizinan, dan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	<b>Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan    Kegiatan</b>	13	13												

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KEGIATAN/ SUB- KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE	LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket	
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
-1	-2	-3		-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-16	
Desa/ Kelurahan serta aparatur pemerintah desa yang efektif di kecamatan	Jumlah koordinasi dan fasilitasi pelayanan adminduk , pajak PBB dan perizinan yang dilaksanakan secara efektif    Kegiatan	100	100	12	6.988.627	12	7.338.058	12	7.704.961	12	8.090.209	12	8.494.719		
	jumlah koordinasi dan fasilitasi pembinaan lembaga kemasyarakatan desa / kelurahan serta aparatur pemerintah desa yang dilaksanakan secara efektif    Kegiatan	9	9	9		9		9		9		9			

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KEGIATAN/ SUB- KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE	LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket	
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
-1	-2	-3		-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-16	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan  Output : Tersedianya dokumen pelayanan administrasi kependudukan, perpajakan, perizinan, dan administrasi perangkat serta Lembaga Pemberdayaan Desa/ Kelurahan yang berkualitas	Jumlah Dokumen Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan    Dokumen	13	13	13	6.988.627	13	7.338.058	13	7.704.961	13	8.090.209	13	8.494.719		
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase kegiatan pemberdayaan desa    %</b>	<b>100</b>	<b>100</b>												
<b>Outcome: Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan bidang kesejahteraan sosial di Kecamatan Nguntoronadi</b>	<b>Persentase Efektivitas Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Sosial    %</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>38.559.360</b>	<b>100</b>	<b>40.487.328</b>	<b>100</b>	<b>42.511.694</b>	<b>100</b>	<b>44.637.278</b>	<b>100</b>	<b>46.869.142</b>		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KEGIATAN/ SUB- KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE	LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket	
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
-1	-2	-3		-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-16	
<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa     Kegiatan</b>	14	14												
	<b>Output : Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi layanan sosial, pembangunan SDM, serta penanganan bencana yang efektif</b>	14	14	24	38.559.360	24	40.487.328	24	42.511.694	24	44.637.278	24	46.869.142		
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan  Output Tersedianya laporan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat bidang kesejahteraan sosial, kepemudaan, kesehatan, keluarga berencana dan penangananbencana	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan     Laporan	14	14	13	38.559.360	13	40.487.328	13	42.511.694	13	44.637.278	13	46.869.142		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KEGIATAN/ SUB- KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE	LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket	
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
-1	-2	-3		-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-16	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM  Outcome : Terciptanya ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan Nguntoronadi	Persentase Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum    %	100	100												
	Persentase penyelesaian potensi gangguan kamtibmas di wilayah kecamatan    %	100	100	100	97.311.375	100	102.176.944	100	107.285.791	100	112.550.080	100	118.177.584		
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum  Output: Terlaksananya koordinasi Trantibmas di Tingkat kecamatan (Forkopimca)	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum    Kegiatan	7	7												
	Jumlah koordinasi trantibmas dan penegakan perda yang dilaksanakan secara efektif    Kegiatan	12	12	12	97.311.375	12	102.176.944	12	107.285.791	12	112.550.080	12	118.177.584		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KEGIATAN/ SUB- KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE  LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											Ket
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-16	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan  Output : Tersedianya Laporan koordinasi Kamtibmas , penegakan Perda dan pembinaan persatuan kesatuan bangsa di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan    Laporan	7	7	12	97.311.375	12	102.176.944	12	107.285.791	12	112.550.080	12	118.177.584	
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>  Outcome : <i>Meningkatnya kualitas kinerja Pemerintahan Desa dan pembangunan wilayah Kecamatan Nguntoronadi secara partisipatif</i>	<i>Persentase Desa / Kelurahan Dengan Nilai Monev Terpadu Minimal 80%    %</i>	80	80											
	<i>Persentase Desa mandiri di wilayah kecamatan    %</i>	76	76	77	19.164.668	80	20.122.901	82	21.129.046	85	22.185.498	87	23.294.772	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KEGIATAN/ SUB- KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE	LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket	
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
-1	-2	-3		-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-16	
	<i>Persentase usulan musrenbang desa / Kelurahan yang sesuai ketentuan dan diakomodir kecamatan     %</i>	100	100	100		100		100		100		100			
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa     Kegiatan	5	5												
Output : Terlaksananya tahapan perencanaan dan penganggaran pemerintah desa serta pembangunan wilayah yang berkualitas	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran desa yang disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan     %	100	100	100	19.164.668	100	20.122.901	100	21.129.046	100	22.185.498	100	23.294.772		
	<i>Persentase usulan musrenbang yang terfasilitasi     %</i>	100	100	100		100		100		100		100			

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KEGIATAN/ SUB- KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											Ket
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
-1	-2	-3		-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-16
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa  Output : Tersedianya dokumen Pemerintahan serta pembangunan desa yang berkualitas	Jumlah Dokumen Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa     Dokumen	5	5	12	19.164.668	12	20.122.901	12	21.129.046	12	22.185.498	12	23.294.772	
<b>TOTAL</b>					<b>2.089.276.689</b>		<b>2.193.740.523</b>		<b>2.303.427.548</b>		<b>2.418.498.923</b>		<b>2.539.423.868</b>	



### 4.3 Sub-kegiatan dalam rangka Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, untuk memfokuskan kegiatannya untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Kecamatan Nguntoronadi maka ditetapkan daftar sub-kegiatan yang mendukung program prioritas pembangunan daerah.

Tabel 4.3  
Daftar Sub-kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi bidang kesejahteraan sosial, pendidikan, kepemudaan, keagamaan, kesehatan, keluarga berencana serta penanganan bencana yang dilaksanakan secara efektif	Persentase kegiatan pemberdayaan desa/kelurahan	Mendukung tujuan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan sasaran Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah

Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Nguntoronadi dapat ditentukan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator yang disajikan merupakan indikator yang terseleksi. Berikut IKU Kecamatan Nguntoronadi yang berlaku dari tahun 2025 sampai dengan 2030.

### 4.4 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Nguntoronadi dapat ditentukan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator yang disajikan merupakan indikator yang terseleksi. Berikut IKU Kecamatan Nguntoronadi yang berlaku dari tahun 2025 sampai dengan 2030.

Tabel 4.4  
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Nguntoronadi

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor	93	93,10	93,20	93,30	93,40	93,50	IKU
2	Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan	Nilai	95,10	95,20	95,30	95,40	95,50	95,60	IKU
3	Nilai SAKIP	Skor	85,25	89,50	89,60	89,70	89,80	89,90	IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU) kecamatan Nguntoronadi dihitung dengan rumus sebagai berikut:



NO.	TUJUAN /SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL
1	Meningkatnya Kualitas pelayanan publik dan pemerintahan di wilayah Kecamatan Nguntoronadi	Indeks Kepuasan Masyarakat	$\text{Nilai IKM} = \frac{\text{Jumlah indeks per parameter}}{\text{Jumlah parameter}} \times 25$ <p>9 parameter IKM :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Persyaratan</li><li>2. Sistem mekanisme dan prosedur</li><li>3. Waktu penyelesaian</li><li>4. Biaya/tarif</li><li>5. Produk spesifikasi jenis pelayanan</li><li>6. Kompetensi pelaksana</li><li>7. Perilaku pelaksana</li><li>8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan</li><li>9. Sarana dan Prasarana</li></ol>
2	Meningkatnya kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Nguntoronadi	Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan	Formulasi Perhitungan Evaluasi Kinerja Kecamatan ( EKK ) yang diambil dari 7 aspek penilaian meliputi : <ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum</li><li>2. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan</li><li>3. Pelaksanaan tugas delegative</li><li>4. Penyelenggaraan tugas atributif</li><li>5. Inovasi / kreativitas kecamatan pada segala aspek penilaian</li><li>6. Pelaksanaan penganggaran dan perencanaan Kecamatan</li><li>7. Pelaksanaan tugas lainnya</li></ol>
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Nguntoronadi	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP - Bobot 30 komponen perencanaan - Bobot 30 komponen pengukuran kinerja - Bobot 15 komponen pelaporan kinerja - Bobot 25 komponen evaluasi  Komponen Perencanaan yang dinilai : <ol style="list-style-type: none"><li>1. Ketersediaan dokumen perencanaan daerah dan Perangkat Daerah</li><li>2. Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)</li><li>3. Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.</li></ol>



			<p>Komponen Pengukuran yang dinilai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengukuran kinerja telah dilakukan</li> <li>2. Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan</li> <li>3. Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien</li> </ol> <p>Komponen Pelaporan, yang dinilai :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaporan Kinerja sesuai dengan sistematika</li> <li>2. Menyampaikan capaian IKU dengan analisa yang lengkap</li> <li>3. LkjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen Perencanaan</li> <li>4. Memuat Rencana aksi tahun berikutnya</li> </ol> <p>Komponen Evaluasi, yang dinilai :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kelengkapan dokumen SAKIP</li> <li>2. Keselarasan dokumen perencanaan</li> <li>3. Ketercapaian Kinerja</li> <li>4. LHE ditindaklanjuti</li> <li>5. Menyusun rencana aksi atas tindakanjut LHE</li> <li>6. LKjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahun berikutnya</li> </ol>
--	--	--	--

#### 4.5 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah ditentukan melalui IKK (Indikator Kinerja Kunci). IKK Kecamatan Nguntoronadi berlaku dari tahun 2025 sampai dengan Tahun 2030 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.5  
Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Nguntoronadi

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			<b>NIHIL</b>						



## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Magetan berlaku selama lima tahun dari tahun 2025 hingga 2029. Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Nguntoronadi Magetan Kabupaten Magetan berisi perencanaan yang merangkum visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok penerima manfaat, serta rencana pendanaan indikatif.

Rencana Strategis Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan ini diharapkan dapat memperkuat peran para pemangku kepentingan dalam menjalankan rencana kinerja, sekaligus menjadi acuan dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Perangkat Daerah. Pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029 memerlukan dukungan serta komitmen dari pimpinan dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan yang menjadi tanggung jawab institusinya.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi pedoman sekaligus acuan dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Kecamatan Nguntoronadi. Dokumen ini juga diharapkan mampu mengakomodasi kebutuhan pelayanan kepada masyarakat, serta berkontribusi secara optimal dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Magetan.

Magetan, 18 Desember 2025



**FISCO YUDHA ARISTA, S.IP, M.M**  
Pembina (IV/a)  
NIP 198801072007011001